

The Effectiveness of the SIKS-NG Application In Poverty Data Management

[Efektivitas Aplikasi SIKS-NG Dalam Pengelolaan Data Kemiskinan]

Sabrina Aisah Putri¹⁾, Ahmad Riyadh Umar Balahmar²⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: riyadh_ub@umsida.ac.id

Abstract. *This article examines the effectiveness of the Next Generation Social Welfare Information System (SIKSNG) application in managing poverty data in Sumput Village, Sidoarjo District. The main objective of this study is to evaluate the extent to which SIKS-NG can improve the accuracy, efficiency, and transparency of poverty data management and support targeted decision-making. The approach used is a descriptive qualitative methodology with data collection through interviews, observations, and document analysis. The results show that although SIKS-NG has helped improve the system for recording and managing citizen data, its effectiveness is still hampered by a lack of socialization to the community, minimal field visits, and technical constraints such as infrastructure and data verification. These findings emphasize the importance of increasing awareness and installing infrastructure to optimize the usefulness and utilization of SIKS-NG. Collaboration between the village and the community is important to optimize poverty alleviation.*

Keywords - effectiveness; e-government; SIKS-NG

Abstrak. *Artikel ini meneliti efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dalam pengelolaan data kemiskinan di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis dan mendeskripsikan sejauh mana SIKS-NG mampu meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi pengelolaan data kemiskinan serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Pendekatan yang digunakan adalah metodologi kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SIKS-NG telah membantu dalam meningkatkan sistem pencatatan dan pengelolaan data warga, efektivitasnya masih terhambat oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, minimnya kunjungan langsung ke lapangan, serta kendala teknis seperti infrastruktur dan verifikasi data. Temuan ini menegaskan pentingnya upaya peningkatan sosialisasi dan pemasangan infrastruktur untuk meningkatkan kegunaan dan pemanfaatan SIKS-NG secara optimal. Secara keseluruhan, penelitian ini menyarankan perlunya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk memaksimalkan manfaat sistem ini dalam mendukung nengentasan kemiskinan dan pelayanan sosial yang lebih efektif.*

Kata Kunci - efektivitas; e-government; SIKS-NG

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia, menjadikannya lebih sederhana berkat dukungan teknologi komputer. Faktanya, mekanisme kerja yang selama ini panjang dan berbelang telah menjadi lebih efektif, di mana komputer memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di dalam suatu instansi. Pengaturan data dilakukan melalui Sistem Basis Data (*Database System*) yang telah mendukung kinerja berbagai instansi. Informasi merupakan elemen yang sangat krusial bagi suatu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan, di mana informasi tersebut dapat diperoleh melalui sistem informasi (*Information System*) [1].

Elektronik government dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi digital di Pemerintah untuk meningkatkan sistem layanan masyarakat yang dibagi menjadi beberapa tahap, langkah pertama adalah persiapan, tahap kedua kematangan, stabilitas ketiga dan tahap penggunaan keempat. Penerapan sistem E-Government akan meningkatkan sistem pemerintah yang transparan, efektif dan efisien. E-goverment dapat didefinisikan secara umum sebagai penggunaan teknologi digital untuk mentransformasi kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja menjadi semakin lebih baik [2]. Menurut Abidin, e-government adalah sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat yang berbasis internet. Tujuannya adalah untuk merekam serta melacak informasi publik, sekaligus memberikan akses layanan publik oleh instansi pemerintah. Contoh nyata dari definisi ini adalah masyarakat dapat membayar tagihan listrik atau mengurus perizinan usaha secara mandiri, dengan bantuan sistem informasi manajemen yang terbuka, mudah, dan cepat [3].

Menurut Keppres No.20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, e-government merupakan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses bisnis membuat organisasi terus berusaha mengimplementasikan teknologi dalam proses yang terintegrasi [4].

Penerapan e-government dalam era keterbukaan informasi publik tentu saja tidak terlepas dari peran Humas atau public relations dari sebuah lembaga. Pada instansi pemerintahan, Humas bertanggung jawab dalam mengolah informasi kepada masyarakat, serta membangun citra dan memperkuat kredibilitas lembaga. Hal ini bisa dilakukan dengan mengelola media lokal lembaga, membuat press release di media massa, menyelenggarakan acara khusus, serta mempublikasikan program dan kegiatan lembaga melalui situs resmi (e-government). Era keterbukaan informasi publik saat ini juga memberikan kebebasan lebih besar kepada media massa dalam mengakses informasi mengenai kinerja pemerintah sebagai badan publik. Fungsi media massa sebagai kontrol sosial dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah membutuhkan akses informasi yang mudah dan cepat. Namun sebelum adanya UU KIP, Humas cenderung membatasi akses informasi tertentu. Dalam UU No. 14 Tahun 2008, telah diatur batasan dan kategori informasi publik yang boleh dan tidak boleh diungkapkan kepada masyarakat.

Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk besar dan sedang berkembang di berbagai bidang kehidupan. Namun, seiring dengan kemajuan tersebut, negara ini juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus, di antaranya adalah isu kemiskinan. Kemiskinan merujuk pada kondisi di mana seseorang atau sekelompok masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya secara layak, baik dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun akses pendidikan. Kondisi ini sering kali menjadi penyebab munculnya berbagai masalah sosial lainnya, sehingga berdampak pada kualitas hidup dan kemajuan bangsa.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah berlangsung sejak lama dan hingga kini masih menjadi beban bersama yang sulit diatasi sepenuhnya. Pemerintah telah berupaya melalui berbagai kebijakan dan program untuk menangani isu tersebut, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, dan perbaikan infrastruktur. Meskipun ada beberapa pencapaian yang sukses, kenyataannya jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa akar permasalahan ini sangat kompleks dan membutuhkan solusi yang lebih efektif serta kerja sama dari berbagai pihak. Kurangnya kesempatan kerja yang merata, tingkat pendidikan yang rendah, dan akses layanan kesehatan yang tidak merata menjadi faktor-faktor penghambat dalam upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia [5]. Hal ini terlihat dari perbedaan yang cukup besar dalam jumlah penduduk miskin di berbagai provinsi di Indonesia, seperti yang tercatat dalam data jumlah penduduk miskin per Maret 2024 pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Data kemiskinan jumlah penduduk miskin di beberapa provinsi di Indonesia per Maret 2024

No.	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
1.	Jawa Timur	3.980.000
2.	Jawa Barat	3.850.000
3.	Jawa Tengah	3.700.000
4.	Sumatra Utara	1.230.000
5.	NTT	1.120.000
6.	Sumatra Selatan	984.240

Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS) 2024

Pada tabel di atas, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia kembali menurun pada bulan Maret 2024. Menurut data yang dirilis oleh BPS, tingkat kemiskinan berada pada 9,03% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25,22 juta orang. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, di mana tingkat kemiskinan mencapai 9,36% dan jumlah penduduk miskin sebanyak 25,90 juta orang. Tingkat kemiskinan pada Maret 2024 dihitung menggunakan standar garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp 582. 932. Angka garis kemiskinan tersebut meningkat 5,90% dibandingkan dengan Maret 2023 yang sebelumnya berada pada Rp 550. 458. Jika dilihat dari provinsi, jumlah penduduk miskin terbesar ada di Jawa Timur yaitu sebanyak 3,98 juta orang dengan tingkat kemiskinan mencapai 9,79% terhadap jumlah penduduk total. Meskipun tingkat kemiskinan di Jawa Timur tertinggi, jumlah penduduk miskin di sana justru mengalami penurunan dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 4,19 juta orang dengan tingkat kemiskinan 10,35%. Selanjutnya, provinsi kedua dengan jumlah penduduk miskin

terbanyak adalah Jawa Barat, sebanyak 3,70 juta orang dengan tingkat kemiskinan 7,46%. Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat juga mengalami penurunan dibandingkan bulan Maret 2023 yaitu sebanyak 3,85 juta orang dengan tingkat kemiskinan 7,62%. Menyusul Jawa Barat, Jawa Tengah menjadi provinsi ketiga dengan jumlah penduduk miskin terbesar yaitu 3,70 juta orang dengan tingkat kemiskinan mencapai 10,83%. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah juga turun dibandingkan Maret tahun sebelumnya sebanyak 3,79 juta orang dengan tingkat kemiskinan 10,77%.

Untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan mempermudah pendataan kesejahteraan, pada tahun 2019, Kementerian Sosial (Kemensos) memperkenalkan aplikasi baru bernama Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Aplikasi ini dapat diakses secara online oleh Dinas Sosial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Aplikasi SIKS-NG merupakan aplikasi nasional yang digunakan oleh penerima berbagai jenis bantuan dari pemerintah. Aplikasi ini menyimpan data terpadu kebijakan kesejahteraan sosial (DTKS). Salah satu fungsi utama aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) adalah menyajikan data kemiskinan yang benar dan terpercaya khususnya di berbagai daerah di Indonesia.

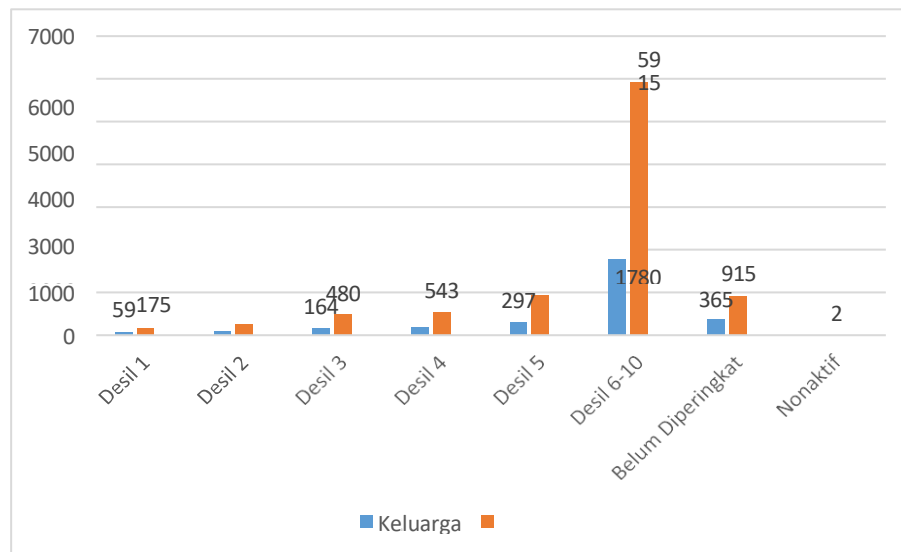
Program aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) adalah aplikasi manajemen yang digunakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mengusulkan data baru serta memperbaiki basis data terpadu mengenai masyarakat miskin. Kementerian Sosial menerapkan sistem satu data terpadu nasional dalam mendistribusikan bantuan sosial kepada Penerima Manfaat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui SIKS- NG, sehingga bantuan sosial dapat tepat sasaran. SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) terintegrasi utamanya dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan sistem perbankan Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BSI). Sistem ini juga terhubung dengan data kependudukan (Dukcapil) untuk validasi KPM bansos. Peran data dalam program penanggulangan kemiskinan sangat penting, karena terkait dengan penentuan sasaran penerima manfaat program. Ketepatan dalam menetapkan sasaran program penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk memastikan keberhasilan program tersebut. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 57/HUK/2017 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017, seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia diberi mandat untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Untuk mengawasi dan memfasilitasi proses ini, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan aplikasi SIKS-NG yang digunakan untuk memperbarui Basis Data Terpadu (BDT).

Terdapat menu utama terdiri dari Beranda, DTKS yang memiliki submenu View DTKS dan Rekap DTKS untuk memfilter berdasarkan usia serta captcha, Verifikasi Kelayakan yang mencakup Daftar Temuan, Unggah Pengesahan, dan Riwayat, serta menu Unduh yang baru tersedia sejak Februari 2025. Menu Unduh ini menyediakan berbagai dokumen seperti surat edaran, SK DTKS, SK PBI JK, video tutorial, dan berkas pendukung. Fitur utama meliputi pemeriksaan kevalidan untuk kelulusan atau data yang tidak normal, pemantauan SP2D untuk kondisi cairnya dana di bank, penginputan hasil musyawarah desa, sinkronisasi rekening, serta tampilan visual seperti angka desil berwarna, grafik riwayat desil, dan foto rumah atau aset KPM. Modul Profil memungkinkan pengguna untuk mengedit profil pengguna atau instansi, mengganti kata sandi, serta mengaktifkan OTP Telegram.

Dengan adanya SIKS-NG, di pemerintah semakin mudah dan cepat dalam melakukan pemutakhiran data kesejahteraan. Harapan kehadiran program SIKS-NG adalah mempermudah pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan menyelesaikan berbagai masalah terkait pengusulan data yang tidak tepat sasaran [6]. Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) diterapkan di Jawa Timur sebagai langkah strategis untuk mengelola dan memverifikasi data kemiskinan secara akurat di tingkat desa dan kabupaten. Ini dilakukan mengingat tingkat kemiskinan yang masih tinggi dengan di posisi ke-1 di provinsi Jawa Timur. Salah satunya di Kabupaten Sidoarjo, aplikasi ini digunakan untuk memperbarui data kemiskinan dengan maksud memberikan informasi yang akurat dan up-to-date agar dapat mendukung kebijakan serta program penghapusan kemiskinan yang efektif dan tepat sasaran.

Desa Sumpat merupakan salah satu desa di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, yang telah menerapkan sistem informasi SIKS-NG. Setiap desa memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam pengelolaan satu data terpadu nasional untuk mengatasi kemiskinan. Aplikasi SIKS-NG berfungsi untuk menyediakan data kemiskinan yang akurat dan terintegrasi. SIKS-NG mengelola perbaikan data lapangan, yang dapat digunakan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran.

Gambar 1. Diagram Rekapitulasi Per Desil Data Kemiskinan Desa Sumpat Tahun 2023-2024



Sumber: Data Diolah dari Pemerintah Desa Sumput (2025)

Berdasarkan data distribusi kesejahteraan di Kelurahan Sumput pada awal tahun 2023–2024, terdapat 2.934 keluarga yang terdiri dari 9.215 orang. Sebagian besar, yaitu 1.780 keluarga atau sekitar 60,7%, berada pada kategori Desil 6–10 yang menunjukkan tingkat kesejahteraan menengah hingga tinggi. Sementara itu, keluarga dengan pendapatan rendah, yaitu Desil 1–3, hanya sekitar 10% dari total keluarga, sehingga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah ini relatif rendah. Desil sendiri merupakan pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan dari yang paling rendah (Desil 1) hingga yang paling tinggi (Desil 10), sehingga semakin tinggi desilnya, semakin sejahtera kondisi ekonominya. Namun, masih ada 365 keluarga atau sekitar 12,4% yang belum terverifikasi dan perlu dicek lebih lanjut. Secara keseluruhan, kondisi sosial ekonomi di Kelurahan Sumput bisa dikatakan cukup baik. Meski demikian, perlu perhatian dan program pemberdayaan khusus bagi keluarga yang berada di Desil terbawah agar kesejahteraan bisa terdistribusi secara merata. Adapun data rumah tangga miskin dengan beberapa jenis program bantuan sosial diantaranya sebagai berikut;

Tabel 2. Data rumah tangga miskin Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo

Program	2023	2024
BPNT	101 KPM	110 KPM
PKH	110 KPM	120 KPM
PBI	406 KPM	412 KPM

Sumber: Data Diolah dari Pemerintah Desa Sumput (2025)

Berdasarkan informasi dari Tabel 2 mengenai penyampaian bantuan sosial di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang menunjukkan perkembangan jumlah penerima BPNT, PKH, dan PBI pada tahun 2023-2024 kondisi rumah tangga miskin menunjukkan penurunan efektivitas Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Jumlah penerima BPNT meningkat dari 101 KPM menjadi 110 KPM (kenaikan 8,91%), penerima PKH dari 110 KPM menjadi 120 KPM (kenaikan 9,09%), serta penerima PBI dari 406 menjadi 412 (kenaikan 1,48%). Perbedaan ini diakibatkan oleh faktor-faktor seperti kesalahan dalam pendataan, perubahan kondisi penerima, atau masalah teknis dalam penyaluran. Meskipun terdapat peningkatan jumlah penerima, hal ini justru mencerminkan penurunan dalam tingkat pengentasan kemiskinan secara proporsional, karena jumlah rumah tangga miskin secara keseluruhan tidak mengalami penurunan yang signifikan. Dengan mendasarkan pada data rumah tangga miskin di Desa Sumput

yang masih tinggi, temuan ini menekankan perlunya evaluasi kembali dalam penargetan agar penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan mampu menurunkan angka kemiskinan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Aplikasi SIKS-NG di Desa Sumput membantu mempercepat dan memudahkan proses pengumpulan serta verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial. Selain itu, adanya tenaga manusia yang kompeten dan jaringan internet yang memadai juga ikut memperlancar penggunaan aplikasi tersebut di desa ini. Namun, penerapan SIKS-NG masih menghadapi beberapa kendala, seperti fitur aplikasi yang belum sempurna, aplikasi terasa berat dan rentan error ketika input data dilakukan secara intensif. Meskipun SDM dan jaringan sudah memadai, perbaikan fitur serta pengembangan aplikasi tetap diperlukan agar penggunaan SIKS-NG dapat berjalan lebih optimal [7].

Berdasarkan observasi awal di Desa Sumput terdapat beberapa permasalahan yang ada pada pengolahan data kemiskinan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Sumput yaitu diantaranya, pihak desa tidak mengecek ke lapangan untuk melihat bagaimana kondisi nyata dari keberadaan penerima manfaat tersebut. Serta, sosialisasi yang belum maksimal karena tidak melibatkan warga hanya melibatkan pihak desa. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang memahami adanya aplikasi SIKS-NG serta manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaannya. Karena itu, pemahaman masyarakat mengenai peran aplikasi ini sebagai sistem pengelolaan data terpadu untuk kesejahteraan sosial yang memudahkan proses pencatatan penerima bantuan menjadi terbatas. Kondisi ini berpotensi memperburuk pencapaian program kesejahteraan sosial, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran bantuan, dan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Hal tersebut juga sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh, Haromin, dkk tahun 2022 dengan penelitian berjudul “Efektivitas penerapan e-government melalui sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation (Siks-Ng) sebagai aplikasi pengolah data kemiskinan di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung” berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa ditemukan permasalahan dalam infrastruktur, verifikasi data yang tidak memadai, dan pemahaman masyarakat yang terbatas tentang manfaat program. Persamaan pada penelitian sebelumnya yakni permasalahan pemahaman masyarakat yang terbatas tentang manfaat program. Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini yaitu lokasi penelitian, penelitian sebelumnya dilaksanakan di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, sedangkan penelitian saat ini dilaksanakan di Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo [8].

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Eka Henny Purwanti tahun 2023 dengan judul “Penerapan E-Government Pada Aplikasi SIKS-NG di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba” berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa ditemukan permasalahan aplikasi SIKS-NG di Desa Sihiong terdapat kendala dalam verifikasi dan validasi data, terutama terkait NIK yang tidak valid. Persamaan yang terdapat pada peneliti sebelumnya yakni meneliti tentang aplikasi SIKS-NG. Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini, penelitian sebelumnya berjudul penerapan, sedangkan penelitian saat ini memakai teori efektivitas [9].

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aresman Zebua, dkk 2024 dengan judul “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation untuk Pengolahan Data Kemiskinan Di Desa Balohili Botomuzoi” berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa ditemukan permasalahan penerapan aplikasi SIKS-NG di Desa Balohili Botomuzoi menghadapi kendala seperti pemadaman listrik, jaringan internet yang tidak stabil, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bantuan yang tersedia. Persamaan yang terdapat pada peneliti sebelumnya yakni sama-sama memakai metode kualitatif. Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini, penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian, penelitian sebelumnya dilaksanakan di botomuzoi dan penelitian saat ini yaitu dilaksanakan di Sumput [10].

Berdasarkan dengan penelitian terdahulu tersebut, kini juga terjadi pada hasil temuan observasi di Desa Sumput yaitu Efektivitas Aplikasi SIKS-NG. Hasil temuan observasi di desa sumput terdapat beberapa permasalahan yaitu kurangnya kunjungan langsung dari petugas ke lapangan yang menyebabkan proses penyampaian informasi tidak efektif. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi terkait Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS NG) masih kurang memadai, sehingga tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem tersebut masih rendah. Situasi ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan frekuensi kunjungan lapangan serta memperbaiki cara penyampaian informasi agar lebih tepat sasaran. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami cara penggunaan SIKS NG secara menyeluruh. Upaya ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kesejahteraan sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan teori menurut Budiani (2007) yang menyatakan bahwa ada empat faktor penting dalam evaluasi efektivitas suatu program yaitu, 1) Ketepatan Sasaran Program, yaitu sejauhmana keberhasilan peserta program sesuai dengan tepat sasaran yang telah ditentukan. 2) Sosialisasi Program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. 3) Tujuan Program, yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil dengan tujuan

program yang telah ditetapkan. 4) Pemantauan Program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian terhadap peserta program. Dengan menggunakan teori ini diyakini mampu memberikan kerangka kerja yang lengkap untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas sosialisasi tersebut [11].

II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan efektivitas dalam menanggulangi permasalahan terkait aplikasi SIKS-NG sebagai system pengelolaan data kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Lokasi penelitian dilakukan di kantor balai desa Sumput Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian ini yaitu pada efektivitas aplikasi SIKS-NG dalam pengelolaan data kemiskinan di Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengukur efektivitas program, peneliti menggunakan ukuran efektivitas program menurut menurut Budiani (2007) yang menyatakan bahwa ada empat faktor penting yaitu, 1) Ketepatan sasaran program, 2) Sosialisasi Program, 3) Tujuan Program, 4) Pemantauan Program. Peneliti menggunakan teori ini karena peneliti menganggap teori ini paling relevan dan memadai dengan indikasi penelitian yang ditemukan peneliti. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Jenis data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara langsung terhadap objek penelitian, dan data sekunder yaitu dari jurnal, karya ilmiah, penelitian terdahulu, buku-buku, dan dokumen maupun arsip. Teknik penentuan informan yang ada dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu atau yang disebut dengan purposive sampling. Oleh karena itu pemilihan informasi diarahkan pada sumber data yang dipandang mempunyai informasi penting yaitu dengan informan operator desa yang terlibat dengan pengurusan SIKS-NG dan dua masyarakat Desa Sumput. Teknik analisis data yang digunakan mengikuti metode Miles dan Huberman (1984), yaitu dengan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan pengamatan di lapangan mengenai penerapan SIKS-NG, wawancara mendalam dengan petugas operator SIKS-NG dan sekretaris desa serta satu warga penerima bansos Desa Sumput. Data yang didapatkan kemudian dibagi ke dalam kategori-kategori tertentu dan disajikan dalam bentuk cerita yang terstruktur untuk memahami bagaimana proses pengelolaan data kemiskinan dilakukan melalui SIKS-NG. Dari tahap ini, peneliti membentuk kesimpulan yang mendalam berdasarkan data yang sudah diproses dan disaring untuk mengevaluasi seberapa efektif dan hambatan-hambatan dalam penggunaan aplikasi SIKS-NG dalam mengelola data kemiskinan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang diperoleh selama di lapangan, sesuai dengan judul penelitian yang berkaitan dengan efektivitas aplikasi SIKS-NG dalam pengelolaan data kemiskinan di Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Data yang diuraikan akan disajikan secara deskriptif. Efektivitas merupakan acuan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Program dikatakan efektif jika usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai standar untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilaksanakan dengan hasil yang dicapai. Berikut adalah uraian pembahasan penelitian berupa analisis data dengan masing-masing fokus penelitian berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Budiani (2007) yang menyatakan bahwa ada empat faktor penting yaitu, 1) Ketepatan sasaran program, 2) Sosialisasi Program, 3) Tujuan Program, 4) Pemantauan Program sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program

Dalam konsep Budiani (2007) tentang ketepatan sasaran program yaitu berkenaan dengan sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Sebagaimana ketepatan sasaran program menunjukkan seberapa tepat peserta program mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Sebuah program dibuat dengan tujuan dan sasaran tertentu yang ingin dicapai [12].

SIKS-NG bertujuan untuk mengusulkan warga ke dalam DTKS yang menerima bantuan pemerintah. Sebagai informasi, dalam mengisi data harus benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan agar penyaluran program bantuan dari Kementerian Sosial tepat sasaran. Program yang diluncurkan harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik pengguna program. Artinya, program ini harus ditujukan kepada kelompok atau individu yang memang membutuhkan dan dapat mendapatkan manfaat dari program tersebut. Dalam penelitian ini, ditegaskan bahwa siapa saja yang menjadi sasaran program SIKS-NG, hal ini merupakan komunitas sasaran program yang terdiri dari masyarakat yang kurang mampu di desa Sumput, kecamatan Sidoarjo, kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan tabel Ketepatan Sasaran Program SIKS-NG di Desa Sumput melalui sistem SIKS-NG dan basis data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai berikut;

Tabel 3. Rekapitulasi Data KK Desa Sumput

No	Uraian	Jumlah (KK)
1	Total KK Desa Sumput	2.934
2	KK terdaftar DTKS	2.569
3	KK layak menerima bantuan (Desil 1-4)	492
4	KK tidak layak (Desil 5-10)	2.077
5	KK yang belum diperingkatkan	365

Sumber: Data Diolah dari Pemerintah Desa Sumput (2025)

Berdasarkan data di atas, jumlah seluruh Kepala Keluarga (KK) di Desa Sumput adalah 2.934 KK, yang mencakup 100% dari total KK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87,56% sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang artinya sebagian besar masyarakat sudah secara resmi tercatat dalam sistem pendataan kesejahteraan sosial yang dikelola pemerintah. Sementara itu, ada 16,77% yang masuk dalam kategori layak mendapatkan bantuan (Desil 1–4), 2.077 keluarga atau 70,79% masuk dalam kategori tidak layak (Desil 5–10), dan 12,44% belum ditentukan kategorinya dalam desil. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun cakupan pendataan sudah cukup tinggi, masih ada beberapa KK yang belum memiliki klasifikasi tingkat kesejahteraan yang jelas. Hal ini berpotensi mengganggu akurasi dalam menentukan target penerima bantuan sosial.

Masalah ini semakin penting ketika dilihat dari hasil wawancara dengan aparat desa yaitu dengan Bapak Nashor selaku operator SIKS NG di kantor kelurahan Desa Sumput, diperoleh informasi sebagai berikut:

“Dalam proses input data SIKS-NG, kami dapat bekerja hanya dari tingkat desa tanpa perlu melakukan verifikasi langsung ke lapangan, karena belum ada panduan resmi untuk melakukan pengecekan langsung. Sebagai operator, kami tidak bisa menentukan apakah seseorang termasuk dalam kategori mampu atau tidak, karena hanya menerima pengusulan dan dokumen berupa foto rumah, KTP, dan KK saja. Selanjutnya, kami hanya menunggu laporan dari RT dan RW mengenai siapa saja yang akan dimasukkan datanya ke dalam SIKS-NG” (wawancara 11 maret 2025).

Sementara hasil wawancara dengan Pak Gufron selaku sekretaris desa diperoleh informasi sebagai berikut:

“Ada kriteria berupa foto rumah yang dapat dijadikan acuan, tetapi hal tersebut belum tentu mewakili kondisi social ekonomi sebenarnya. Sebab, kondisi rumah saja tidak selalu mencerminkan kemampuan penghuninya, karena banyak rumah yang tampak kurang layak namun penghuninya sebenarnya mampu secara ekonomi” (wawancara 21 juli 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Program SIKS-NG di Desa Sumput menunjukkan ketepatan sasaran yang belum optimal meskipun cakupan pendataan DTKS telah mencapai 87,56% dari total 2.934 kepala keluarga. Hanya 16,77% dari keluarga (Desil 1-4) yang berhak mendapatkan bantuan, sementara 70,79% tidak memenuhi syarat (Desil 5-10) dan 12,44% belum diklasifikasikan ke dalam desil, yang bisa menyebabkan kesalahan dalam menargetkan bantuan. Proses pemasukan data yang bergantung pada usulan dari RT/RW, dokumen yang terbatas (seperti foto rumah, KTP, dan KK), serta tidak adanya verifikasi langsung di lapangan dan panduan resmi membuat munculnya ketidakpastian dalam menentukan kondisi kemampuan ekonomi penerima, seperti yang diungkapkan oleh operator SIKS-NG dan sekretaris desa. Ini menunjukkan bahwa perlu diperkuat cara pengecekan agar program tersebut tepat menjangkau sasarannya.

Penelitian yang telah dilakukan mendukung temuan ini, dengan mengacu pada kajian penelitian terdahulu dari Melly Nia Dwi Aprilia dan Ilmi Usrotin Choiriyah pada tahun 2024, yang berjudul "The Effectiveness of E-Government on the Next Generation social welfare information System (SIKS-NG) as a Poverty Data Processing Application in Kedungpeluk Village" hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem SIKS-NG di Desa Kedungpeluk masih memiliki kekurangan dalam memastikan data yang benar-benar akurat dan sesuai kondisi nyata di lapangan. Hal ini tercermin dari adanya ketidakstabilan jumlah penerima manfaat dari bulan ke bulan dan kurangnya pengamatan langsung oleh perangkat desa terhadap kondisi masyarakat sehingga data yang didapat belum sepenuhnya valid dan tepat sasaran.

2. Sosialisasi Program

Dalam konsep Budiani (2007) yang dijelaskan bahwa sosialisasi program adalah kemampuan penyelenggara program dalam menyebarkan informasi mengenai pelaksanaan program, sehingga masyarakat secara umum dan peserta program secara khusus dapat mengetahui tentang program tersebut.

Sosialisasi program adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan program kepada peserta yang dituju [13]. Dalam aplikasi SIKS-NG, indikator sosialisasi program masih belum cukup optimal dalam penggunaannya oleh perangkat desa di Desa Sumpat, Sidoarjo. Dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sosialisasi program yang mendukung sangat penting karena tanpa sosialisasi yang memadai, kebijakan dalam penerapan sistem e-government belum bisa dikatakan optimal. Keberhasilan suatu program sangat bergantung pada seberapa baik program tersebut dikenal dan dipahami oleh target sasaran.

Sosialisasi program memastikan bahwa peserta sasaran memahami dengan baik tujuan dan manfaat dari program yang dijalankan. Kurangnya sosialisasi atau pengumuman informasi oleh perangkat Desa Sumpat mengenai aplikasi SIKS-NG menyebabkan masyarakat tidak mengetahui adanya aplikasi ini yang digunakan untuk mengajukan bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI bagi warga yang tidak mampu di Desa Sumpat. Sosialisasi program merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu program.

Oleh karena itu, sosialisasi program harus dilakukan secara terencana dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki organisasi agar tujuan program dapat tercapai secara baik. Dengan melibatkan pihak-pihak terkait, semua pihak di Desa Sumpat dapat sepakat dan memahami tujuan serta makna dari program SIKS-NG.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nashor selaku operator SIKS NG di kantor kelurahan Desa Sumpat, diperoleh informasi sebagai berikut:

“Tidak ada sosialisasi dengan masyarakat karena program SIKS-NG hanya ditujukan untuk petugas desa.” (wawancara 11 maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para operator SIKS NG, tidak adanya sosialisasi langsung kepada warga, banyak orang tidak mengetahui adanya program SIKS NG serta manfaat yang bisa diperoleh dari program tersebut. Hal ini berpotensi menyebabkan kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan SIKS NG secara optimal.

Sementara hasil wawancara dengan salah satu Warga Desa Sumpat yaitu Bu Anis, diperoleh informasi sebagai berikut:

“Saya belum mengerti secara jelas mengenai SIKS-NG. Yang saya ketahui adalah ada bantuan yang diberikan kepada warga yang kurang mampu, biasanya orang-orang itu kalau tidak mampu, menghadap ke pak rt biar dapat bantuan, tapi juga ada yang mampu mendaftar juga mbak soalnya rumahnya jelek padahal orangnya masih mampu.” (wawancara 18 juli 2025).

Dari uraian dalam sosialisasi program tersebut, di Desa Sumpat terlihat bahwa pemahaman masyarakat terhadap program SIKS-NG masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang menyeluruh serta kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat. Akibatnya, banyak warga hanya mengetahui secara umum adanya bantuan bagi warga yang kurang mampu, namun tidak memahami dengan jelas mekanisme serta kriteria pendaftaran yang dibutuhkan. Penelitian yang telah dilakukan mendukung temuan ini, dengan mengacu pada kajian penelitian terdahulu dari Diah Purnamawati, Suyeno, dan Hirshi Anadza pada tahun 2022, yang berjudul “Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Mojokerto Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi untuk mempublikasikan Si-Mojo dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan website. Selain itu, DPMPSTP Kota Mojokerto juga mengadakan bimbingan teknis gabungan di kecamatan dan menyediakan petugas khusus di front office untuk membantu pemohon dalam menggunakan aplikasi Si-Mojo. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat dalam mengakses layanan melalui aplikasi Si-Mojo. Pada penelitian ini, sosialisasi dilakukan dengan lancar, berbeda dengan penelitian saat ini di mana sosialisasinya tidak berjalan lancar karena kekhawatiran warga akan mengajukan sendiri untuk menjadi penerima manfaat SIKS-NG.

3. Tujuan Program

Menurut Budiani (2007) tujuan program merupakan berkenaan dengan sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya [14]. Evaluasi terhadap tujuan program digunakan untuk menilai sejauh mana program tersebut berhasil mencapai hasil yang telah direncanakan. Penilaian ini membantu mengetahui seberapa baik tujuan program tercapai dan memberikan masukan penting untuk meningkatkan pelaksanaan program di masa depan agar tujuan dapat tercapai secara maksimal.

Sebelum SIKS-NG diterapkan, pengelolaan data penduduk di Desa Sumpat masih sangat berantakan dan tidak menggunakan sistem yang jelas. Pendataan penerima bantuan sosial hanya bergantung pada usulan dari RT, yang biasanya hanya merekomendasikan keluarga atau kerabat dekat petugas desa. Akibatnya, bantuan sosial tidak sampai kepada yang benar-benar membutuhkan, banyak keluarga miskin terlewatkan, sementara orang-orang yang tidak terlalu membutuhkan justru menerima bantuan. Pendataan seperti ini rentan terhadap pemberian

keterangan yang tidak jujur dan tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan pemerintahan desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan aturan yang diatur oleh pemerintah terkait, program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dibuat agar lebih tepat sasaran, lebih akurat, dan lebih terpadu dalam mengelola data kemiskinan di tingkat desa atau kelurahan, serta menjadi sumber data yang terintegrasi dan terus diperbarui untuk kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nashor selaku operator SIKS NG di kantor kelurahan Desa Sumput, diperoleh informasi sebagai berikut:

“Dengan adanya SIKS-NG, semuanya jadi lebih tertata dan efektif karena memudahkan serta meningkatkan keakuratan data. Soalnya, dulu datanya masih agak amburadul, biasanya dari pihak RT cuma mengusulkan keluarga dekatnya saja. Nah, sekarang dengan SIKS-NG, semuanya jadi lebih teratur karena ada sistem yang jelas dan rapi.” (wawancara 11 maret 2025).

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Gufron selaku sekretaris desa di kantor kelurahan Desa Sumput, diperoleh informasi sebagai berikut:

“Program SIKS-NG ini bertujuan meningkatkan keakuratan dan efektivitas dalam mengumpulkan data tentang warga desa yang kurang mampu, tetapi kita tidak tau apakah orang itu benar benar tidak mampu atau mampu, karena pihak desa tidak terjun lapangan.” (wawancara 21 juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan, dapat disimpulkan bahwa program SIKS-NG di kantor kelurahan Desa Sumput yang secara substantif didasarkan pada prinsip pendataan kemiskinan berbasis sistem dan regulasi kesejahteraan social berjalan belum optimal dalam pengelolaan data warga, terutama bagi warga yang kurang mampu. Secara prosedural, program ini berhasil meningkatkan efektivitas dalam pengumpulan data, sehingga proses pendataan menjadi lebih teratur, sistematis, dan transparan dibandingkan kondisi sebelum SIKS-NG diterapkan. Namun, setelah adanya SIKS-NG, verifikasi lapangan masih belum dilakukan secara langsung oleh perangkat desa, pendataan hanya menerima usulan dari RT beserta foto pendukung, tanpa kunjungan ke rumah tangga tersebut. Akibatnya, seringkali foto rumah yang jelek tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi penghuninya (misalnya penghuni mampu), sebaliknya ada rumah yang tampak layak tetapi penghuninya benar-benar tidak mampu. Hal ini menyebabkan perangkat desa tidak sepenuhnya memahami kondisi sebenarnya warga, sehingga berpotensi mengganggu kelancaran penyaluran bantuan sosial dan menurunkan efektivitas program SIKS-NG secara keseluruhan.

Penelitian yang telah dilakukan mendukung temuan ini, dengan mengacu pada kajian penelitian terdahulu dari Diah Purnamawati, Suyeno, dan Hirshi Anadza pada tahun 2022, yang berjudul “Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Mojokerto Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan program Si-Mojo adalah untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan. Pada penelitian ini, sosialisasi dilakukan dengan lancar, berbeda dengan penelitian sekarang di mana sosialisasi tidak berjalan lancar karena aplikasi SIKS-NG hanya diperuntukkan petugas desa. Pada penelitian saat ini, tujuan program SIKS-NG adalah untuk mempermudah Dinas Sosial dalam mendapatkan dan mengumpulkan data valid mengenai masyarakat penerima manfaat bantuan.

4. Pemantauan Program

Menurut Budiani (2007) pemantauan program berkenaan dengan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. yang artinya pengawas aplikasi SIKS-NG dari dinas sosial telah melakukan pemantauan terhadap aplikasi tersebut. Dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penting untuk mempertimbangkan pemantauan program yang mendukung. Tanpa memperhatikan pemantauan program, kebijakan dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik bisa terganggu. Pemantauan program adalah kegiatan yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala. Ini sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan serta untuk mengidentifikasi adanya potensi perbaikan yang diperlukan [15].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nashor selaku operator SIKS-NG di kantor kelurahan Desa Sumput, diperoleh informasi sebagai berikut:

“kalau pemantauan atau monitoring evaluasi itu tidak ada, tetapi adanya inturksi untuk melakukan pembaruan data atau verifikasi setiap bulannya” (wawancara 11 juli 2025).

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Gufron selaku sekretaris desa di kantor kelurahan Desa Sumput, diperoleh informasi sebagai berikut:

“tidak ada pemantauan program SIKS-NG mbak, jadi kita disuruh untuk pembaruan saja setiap bulannya” (wawancara 21 juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua sumber informasi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pemantauan atau evaluasi rutin terhadap program SIKS-NG. Keduanya menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan hanya

meliputi instruksi pembaruan dan verifikasi data bulanan, tanpa adanya monitoring formal seperti audit berkala atau indikator kinerja yang terukur. Situasi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan program, yang dapat diperbaiki dengan mengembangkan mekanisme evaluasi berkala yang didasarkan pada SOP, guna menjamin akuntabilitas dan optimalisasi layanan e-government.

Penelitian sebelumnya oleh Diah Purnamawati, Suyeno, dan Hirshi Anadza pada tahun 2022 yang berjudul “Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Mojokerto Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto)” juga menunjukkan bahwa program aplikasi Si-Mojo melakukan pemantauan program. Ada kelompok khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan, serta dilakukan evaluasi sederhana dalam kelompok tersebut sebagai upaya pemantauan tambahan, berbeda dengan penelitian sekarang di mana tidak adanya pemantauan program atau monitoring evaluasi. Pada penelitian saat ini, tujuan pemantauan program SIKS-NG untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait Efektivitas Aplikasi SIKS-NG Dalam Pengelolaan Data Kemiskinan di Desa Sumpat Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan uraian yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas aplikasi SIKS-NG di desa sumpat belum sepenuhnya optimal dalam pengelolaan data kemiskinan, yang tercermin dari beberapa indikator: Pada indikator 1) Ketepatan Sasaran Program, proses pemilihan penerima manfaat dalam program SIKS-NG di Desa Sumpat masih belum optimal. Karena kurangnya verifikasi langsung di lapangan dan observasi yang memadai, data tentang penerima bantuan seringkali tidak tepat sasaran. Metode pengusulan yang hanya bergantung pada dokumen dan laporan dari tingkat RT/RW tanpa pengawasan langsung di lapangan masih memungkinkan adanya kesalahan dalam menentukan sasaran. 2) Sosialisasi Program, sosialisasi program SIKS-NG di Desa Sumpat masih kurang efektif, yang terlihat dari minimnya komunikasi dan sosialisasi antara pihak perangkat desa dengan warga yang menjadi penerima manfaat. 3) Tujuan Program, tujuan program SIKS-NG untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi pengelolaan data warga belum tercapai dengan baik. Sistem ini berhasil memperbaiki proses pendataan dan manajemen data, namun masih ada kelemahan dalam memvalidasi kondisi sesungguhnya dari warga miskin, yang dapat mengurangi efektivitas penyaluran bantuan. 4) Pemantauan Program, pemantauan pada program SIKS-NG masih belum optimal. Karena tidak adanya pemantauan atau evaluasi rutin terhadap program SIKS-NG.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas karuniaNya. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak, tidak akan terwujud dengan baik bagi saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih terutama untuk kedua Orang Tua saya yang selalu mensupport untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, dan saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai kantor desa sumpat. Juga saya mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing serta saya mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial terutama Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah memberikan kesempatan serta kontribusi sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] E. Ramadan, I. Nurlatifah, I. R. Shangadah, S. E. Ginanjar, And R. Santa, “Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks-Ng) Untuk Pengajuan Dtk’s,” *J. Sos. Dan Teknol.*, Vol. 4, No. 2, Pp. 109–115, 2024.
- [2] H. Atthahara, “Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government : Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Purwakarta,” *J. Polit. Indones.*, Vol. 3, No. 1, Pp. 66–77.
- [3] L. Muliawaty And S. Hendryawan, “Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang),” 2020. [Online]. Available: [Http://Dx.Doi.Org/10.23969](http://Dx.Doi.Org/10.23969)
- [4] N. M. S. Harthamia, N. P. A. Prabawati, And I. D. A. P. Wirantari, “Implementasi Kebijakan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (Siks-Ng) Studi Kasus Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar,” *Socio-Political Commun. Policy*, Vol. 2, No. 3, 2025.
- [5] D. Ariansyah, M. Sagita, R. Annisa, And J. Sarmila, “Analisis Faktor Penyebab Ketidakmerataan Penyaluran Bansos Kepada Masyarakat Miskin,” *J. Penelit. Ilmu-Ilmu Sos.*, Vol. 2, No. 10, 2025, Doi:

- 10.5281/Zenodo.15482268.
- [6] M. F. Akbar, S. Malipi, And N. A. Sahi, "Implementation Of Social Welfare (DtkS) Integrated Data Program Through The Next Generation Social Welfare Information System (Siks Ng)," *Int. J. Pap. Public*, Vol. 4, No. 2, Pp. 29–41, 2023.
- [7] A. V. Setya And D. R. S. S.Stp, M.H., M.Si, "Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- Next Generation (Siks-Ng) Dalam Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DtkS) Di Dinas Sosial Pppa Kabupaten Banjarnegara," Pp. 1–8, 2024.
- [8] A. Setiawan And Y. Yamasari, "Evaluasi Performa Website Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (Siks- Ng) Di Kelurahan Lembayan Kulon Kabupaten Magetan Dengan Google Lighthouse," (*Journal Informatics Comput. Sci.*, Vol. 07, Pp. 218–227, 2025.
- [9] E. H. Purwanti, "Penerapan E-Government Pada Aplikasi Siks-Ng Di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba," *J. Polit. Democr. Stud.*, Vol. 4, Pp. 91–103, 2023.
- [10] A. Hutagalung, E. Mailsari, N. Rahmanti, And L. Nugraha, "Penerapan Aplikasi Siks-Ng Dalam Penerimaan Bantuan Pangan Non-Tunai (Bpnt) Dikelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan," *J. Ilm. Elektron. Dan Komput.*, Vol. 17, No. 1, Pp. 83–87, 2024.
- [11] N. Wayan Budiani, "Ide Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna 'Eka Taruna Bhakti' Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar."
- [12] V. Lestari, "Pelaksanaan Program Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung," 2019.
- [13] Z. A. Hasibuan And H. B. Santoso, "Standardisasi Aplikasi E-Government Untuk Instansi Pemerintah," Vol. 16424, Pp. 3–4, 2005.
- [14] I. Prabowo And E. H. Fanida, "Inovasi Pelayanan Kepegawaian Melalui Aplikasi Sistem Informasi Mobile Kepegawaian Terintegrasi (Simoker) Berbasis Android Di Badan Kepegawaian Kota Mojokerto," 2018.
- [15] M. N. D. Aprilia And I. U. Choiriyah, "The Effectiveness Of E-Government On The Next Generation Social Welfare Information System (Siks-Ng) As A Proverty Data Processing Application In Kedungpeluk Village [Efektivitas E -Government Pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation," Pp. 1–12, 2024.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.